



PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN INKLUSIF DALAM MENDUKUNG DESA WISATA BUDAYA DI DESA PLUNTURAN

Anggraeny Puspaningtyas¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 23 Juli 2021
Disetujui 07 Agustus 2021
Dipublikasikan 10 September 2021

Kata Kunci :
Sumber Daya Manusia,
Kapasitas,
Pembangunan Inklusif,
Wisata Budaya

Abstrak

Desa Plunturan merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo memiliki banyak produk budaya dan masih dipertahankan. Salah satu produk budaya desa tersebut adalah Reog Ki Onggo Pati. Reog Ki Onggo Pati adalah kesenian yang dijadikan ikon Desa Plunturan karena masih menjunjung tinggi orisinalitas Reyog. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yang menjadi batasan penelitian merupakan hasil dari beberapa kajian literatur yang sesuai dengan kondisi eksisting Desa Plunturan yaitu a) sumberdaya untuk pembangunan; b) ketenagakerjaan yang layak; c) pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, dan d) meningkatnya standar penghidupan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pengembangan kapasitas SDM melalui pertumbuhan inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan sudah berjalan tetapi masih sangat lambat. Sumber daya untuk pembangunan Desa Wisata Plunturan belum siap dalam segala aspek. Jika sumber daya kuat, maka pertumbuhan ekonomi yang berlangsung akan berkelanjutan sehingga terciptanya redistribusi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari aspek ketenagakerjaan, belum terkoordinasi dengan baik oleh Pemerintah Desa, BUMDes dan Pokdarwis serta lembaga pemerintah desa lainnya dalam ruang lingkup pengembangan Desa Wisata Plunturan sehingga pertumbuhan ekonomi di desa sangat lambat. Hal ini berakibat lemahnya daya saing antar desa dan/atau daerah dalam hal wisata budaya. Aspek-aspek tersebut jika berjalan dan terkoordinasi dengan baik, maka outputnya adalah dapat meningkatkan standar penghidupan Desa Plunturan.

Increasing Human Resources Capacity Through Inclusive Development in Supporting Cultural Tourism in Plunturan Village

Abstract

Keywords:

Human resource capacity, inclusive development, cultural tourism

Plunturan Village is one of the villages located in Ponorogo Regency which has many cultural products and is still preserved. One of the cultural products of the village is Reog Ki Onggo Pati. Reog Ki Onggo Pati is an art that has become an icon of Plunturan Village because it still upholds the originality of Reog. The purpose of this study is to analyze the capacity building of human resources (HR) through inclusive development in supporting the Cultural Tourism Village in Plunturan Village, Pulung District, Ponorogo Regency, East Java. The researcher uses a qualitative research type with a descriptive approach. The research focus which is the limitation of the research is the result of several literature studies that are in accordance with the existing conditions of Plunturan Village, namely a) resources for development; b) decent employment; c) strong and sustainable economic growth, and d) rising standards of living. Based on the results of research and discussions conducted by researchers, it can be concluded that efforts to develop human resource capacity through inclusive growth in supporting the Cultural Tourism Village in Plunturan Village have been running but are still very slow. Resources for the development of Plunturan Tourism Village are not ready in all aspects. If the resources are strong, then the ongoing economic growth will be sustainable so as to create long-term redistribution. Meanwhile, viewed from the employment aspect, the Village Government, BUMDes and Pokdarwis and other village government institutions have not coordinated well within the scope of the development of Plunturan Tourism Village so that economic growth in the village is very slow. This results in weak competitiveness between villages and/or regions in terms of cultural tourism. If these aspects are implemented and coordinated properly, the output will be able to improve the living standards of Plunturan Village.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi: anggraenyuspa@untag-sby.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ragam budaya yang sangat melimpah dan masih dapat ditemui jejaknya hingga saat ini. Menurut *United Nations-World Tourism Organization* (UNWTO), “wisatawan global yang melakukan perjalanan wisata budaya adalah untuk lebih mengenal keberagaman budaya” (Kementerian Pariwisata, 2019:2). Pariwisata berbasis budaya berfokus pada kegiatan yang merepresentasikan cerita-cerita masa lalu yang dikolaborasikan dengan masa sekarang (kekinian). Sebagai contoh representasi kegiatan kekinian adalah festival, ritual, tour museum, teater, *cultural heritage tourism* yang merupakan elemen wisata warisan budaya yang banyak dicari oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Wisata sejarah dan wisata budaya di Indonesia memiliki unsur wisata dan pelestarian budaya. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa “budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan pada nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009).

Pengembangan wisata sejarah dan warisan budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Cagar Budaya yang berkembang merepresentasikan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan”. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mendukung dan melandasi kegiatan pariwisata budaya secara normatif.

Masyarakat setempat merupakan aktor penting dalam pengembangan wisata budaya karena secara administratif dan geografis, ada ikatan adat istiadat dan norma yang sudah dipahami dan dijalankan dalam waktu yang lama melalui warisan budaya. Partisipasi masyarakat

Bertujuan untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk mengembangkan pariwisata budaya. Pengembangan destinasi pariwisata menurut Cooper dkk dalam (Sunaryo, 2013) memiliki komponen sebagai berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (*attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya maupun buatan/*artificial*;
2. Aksesibilitas (*accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi;
3. Amenitas (*amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata;
4. Fasilitas umum (*ancillary service*) yang mendukung kegiatan pariwisata;
5. Kelembagaan (*institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terkenal dengan Budaya Reyog Ponorogo sehingga dikenal dengan julukan Kota Reyog atau Bumi Reyog. Acara tahunan yang diadakan di Kabupaten Ponorogo pada Bulan Suro (Bulan Muharram) adalah rangkaian acara pesta rakyat Grebeg Suro yang menampilkan berbagai macam seni dan tradisi. Mulai dari Festival Reyog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. Hal tersebut didukung hampir setiap desa di Kabupaten Ponorogo yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya.

Desa Plunturan merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo memiliki banyak produk budaya dan masih dipertahankan. Setiap dusun yang ada di Desa Plunturan memiliki budaya atau kesenian yang berbeda-beda. Salah satu produk budaya desa tersebut adalah Reog Ki Onggo Pati. Reog Ki Onggo Pati adalah kesenian yang dijadikan ikon Desa Plunturan karena berbeda dari Reyog di daerah lain. Grup Reog di Desa Plunturan dibagi menjadi 4, yaitu Reog Sepuh, Reog Anak, Reog Perempuan dan Reog Taruna. Selain Reog, masih ada beberapa produk budaya, seperti Gajah-Gajahan; Jathilan; Ganongan; Tledakan; Karawitan; Wayang Kulit; Coke'an; Metik Desa; Metri Desa; Metri Tandur; Campursari; Sego Angkruk. Kesenian-kesenian tersebut dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 25 pada Festival Selawenan.

Adapun para pelaku seni berasal dari lintas generasi. Regenerasi pelaku seni dilakukan melalui sanggar-sanggar dan kelompok-kelompok seni. Para pelaku seni saat ini tidak menganggap potensi seni yang ada di desanya sebagai mata pencaharian utama. Mereka memiliki mata pencaharian lain seperti petani, pedagang, pegawai negeri, aparat pemerintahan, guru, petugas kesehatan, karyawan swasta. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif dari pelaku seni untuk menarik wisatawan dari luar wilayah. Mereka hanya akan menunggu ketika ada acara Selawenan dan undangan dari warga untuk menampilkan kesenian di acara-acara tertentu seperti perkawinan, acara bersih desa, khitanan, syukuran, penyambutan tamu, dan pentas sebagai delegasi budaya.

Masyarakat Desa Plunturan memanfaatkan potensi seni yang dapat dikembangkan

sebagai industri kreatif. Seni pertunjukan belum mampu menarik minat wisatawan untuk datang di Desa Plunturan. Selain itu kesadaran masyarakat memaksimalkan potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas. Pemahaman terhadap konsep desa wisata belum terbangun, unsur-unsur sapta pesona (aman, tertib, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) belum menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama. Belum adanya pemandu wisata menjadikan potensi wisata belum terekspos dengan baik. Dukungan Kementerian Pariwisata bahwa “Wisata sejarah dan warisan budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi destinasi wisata sejarah dan warisan budaya tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata sejarah dan wisata warisan budaya yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara” (Hartono & Wijayanto, 2019).

Masyarakat Desa Plunturan, dalam hal ini sumber daya manusia yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.771 orang, perempuan sebanyak 1.811 orang dan jumlah kepala keluarga sejumlah 1.077 KK. Dibagi dalam 4 dusun yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Cabeyan, Dukuh Suru dan Dukuh Gadungan (Desa Plunturan, 2021). Pengembangan desa menjadi desa wisata budaya diinisiasi oleh Pemerintah Desa Plunturan, dimana sebagian besar masyarakat juga mendukung dan memperlihatkan antusias yang tinggi. Antusias masyarakat dapat dilihat dari kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa yang berhasil menyelenggarakan gebyar budaya pada Bulan Januari tahun 2020 sekaligus deklarasi Desa Plunturan sebagai Desa Wisata Budaya.

Persiapan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Budaya diantaranya adalah memenuhi fasilitas umum minimal yang sudah ditunjukkan dengan adanya enam kamar untuk *homestay* yang disiapkan oleh pemerintah desa melalui BUMDES dan rumah warga yang dipersiapkan untuk hunian wisatawan. Selain itu, terdapat pula toilet umum yang terletak di sekitar tempat pementasan. Pemerintah Desa Plunturan juga sedang membangun sentra oleh-oleh dan pusat kerajinan serta fasilitas parkir yang memadai. Meskipun demikian, Tim pengelola desa wisata masih belum optimal dan Pemerintah Desa Plunturan masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan desa. Seperti, galeri seni, pusat informasi wisata, pusat pertunjukan, dan pusat pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah). Menurut Kementerian Pariwisata, “Produk wisata sejarah dan warisan budaya setidaknya mempunyai 4 (empat) komponen, yaitu: (i) produk budaya, (ii) produk naratif, (iii) produk wisata, serta (iv) produk destinasi. Komponen-komponen pembentuk tersebut saling berkaitan satu sama lain secara komprehensif membentuk arsitektur produk

pariwisata berbasis budaya.”(Hartono & Wijayanto, 2019). Dari empat komponen tersebut, dapat dijabarkan untuk potensi Desa Wisata Budaya Plunturan adalah sebagai berikut:

1. Produk budaya Desa Plunturan adalah Reog Ki Onggo Pati (Reog Sepuh, Reog Anak, Reog Perempuan dan Reog Pemuda);
2. Produk naratif Desa Plunturan adalah cerita rakyat Ki Onggo Pati;
3. Produk wisata Desa Plunturan adalah Gajah-Gajahan; Jathilan; Ganongan; Tledakan; Karawitan; Wayang Kulit; Coke'an; Metik Desa; Metri Desa; Metri Tandur; Campursari; Sego Angkrak;
4. Produk destinasi Desa Plunturan adalah enam kamar untuk *homestay* yang dikelola oleh BUMDES dan rumah warga yang dipersiapkan untuk hunian wisatawan, toilet umum yang terletak di sekitar tempat pementasan, sentra oleh-oleh dan pusat kerajinan serta fasilitas parkir yang memadai (masih dalam tahap pembangunan).

Kepala Desa Plunturan selaku kepala pemerintahan desa memiliki peran penting dalam jalannya segala program dan kegiatan untuk mewujudkan Desa Wisata Budaya Plunturan. Pemerintah desa memiliki organisasi dan birokrasi yang sederhana (sekretaris desa hingga kepala-kepala urusan) bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan di dalamnya. Perangkat desa yang sering disebut “Pamong Desa”, sebagai abdi masyarakat, perangkat desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, pasangan suami istri yang akan bercerai, konflik antarwarga, dan sebagainya).

Peran serta masyarakat dalam pengembangan Wisata Budaya Desa Plunturan bertujuan untuk meningkatkan peran aktif mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi secara berkesinambungan dan berjangka panjang. Menurut Rosidin, “Lemahnya partisipasi (voice, akses, dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa” (Rosidin, 2019). Maka dari itu, optimalisasi peran serta masyarakat merupakan tantangan Kepala Desa Plunturan beserta perangkat desa. Tidak hanya pada saat penyelenggaraan pementasan atau gebyar seni saja tetapi juga pada saat kegiatan yang berkesinambungan dan terencana.

Sejalan dengan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dibutuhkan model pembangunan inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya Plunturan. Hal ini diungkapkan oleh Lestari bahwa “Upaya membangun modal manusia dari sisi hilir sangat ditentukan oleh beragam intervensi pada pasar tenaga kerja. Pertumbuhan yang inklusif membutuhkan dua prasyarat (1) *engagement* dalam aktivitas produktif dan (2) orientasi dari

proses pertumbuhan (Lanchovichina dan Lundstrom, 2008), (Firdausy, 2020). Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Kajian literatur yang penulis gunakan terdiri dari penelitian terdahulu yang berasal dari artikel jurnal relevan dan beberapa literatur yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah administrasi pembangunan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan inklusif. Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang diusung pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui proses pengabdian kepada masyarakat, pihak akademisi dapat secara langsung melakukan pendampingan, pelatihan dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dua artikel di atas juga membahas mengenai pengembangan dan pengelolaan desa wisata yang secara melembaga di kelola oleh BUMDes dan Pokdarwis di Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan konsep peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mulai dari masyarakat melalui meningkatkan pembangunan inklusif dalam mewujudkan desa wisata budaya. Sedangkan literatur konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Administrasi pembangunan secara definisi umum mencakup dua pengertian, yaitu 1) administrasi dan 2) pembangunan. Menurut (Siagian, 2012), definisi kerja dari administrasi pembangunan yaitu “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Selanjutnya dalam penerapan pembangunan daerah yang diturunkan ke wilayah sampai dengan pemerintahan desa (otonomi daerah) mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Menurut Sumodiningrat (1999) dalam (Sun'an, 2015), misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. “Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.”

Merujuk pada pelaksanaan pembangunan daerah, ada beberapa model yang digunakan oleh beberapa negara berkembang, salah satunya adalah “Model III, menitikberatkan pada

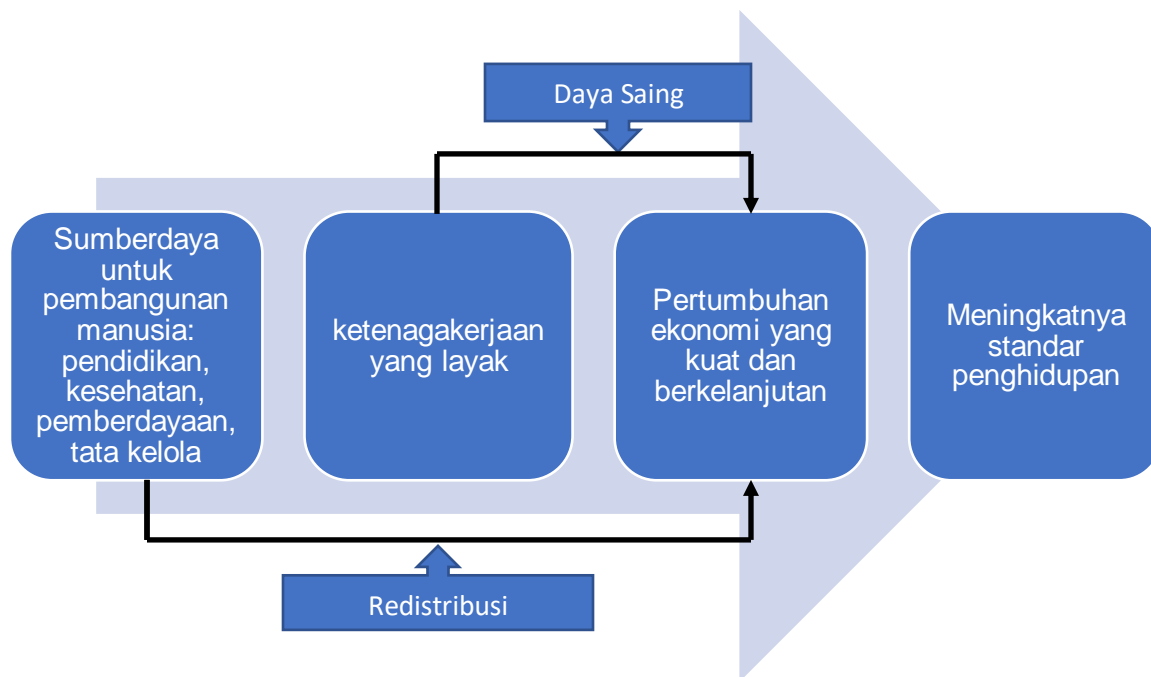
pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang berkembang pada dekade 1980-an. Model ini mengupayakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, pembelajaran masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal, dalam rangka pembangunan masyarakat” (Sun’an, 2015). Di dalam ruang lingkup pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki ruang lingkup sebagai fungsi normatif dan empirik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa adalah pelayanan administratif (surat menyurat) kepada warga. Selain itu secara normatif, masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar keterkaitan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dari segi personal. Pola pemerintahan diikat dengan tali kekerabatan atau ketetanggaan sehingga untuk urusan pribadi dan publik di desa terkadang sering tidak jelas. Kondisi struktur aparatur desa pada realitasnya banyak dinamika dan permasalahan yang terjadi. Menurut (Siagian, 2012), ada tujuh langkah yang harus diambil dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dan penentuan kebutuhan, yang berarti memecahkan salah satu permasalahan yang dirasakan terdapat dalam organisasi;
- 2) Penyusunan materi pendidikan dan pelatihan yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan tugas;
- 3) Pemilihan peserta yang menghadapi permasalahan tertentu sehingga diharapkan memperoleh manfaat yang maksimal dari program pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pemilihan instruktur yang kapabel yang tidak hanya menguasai materi yang merupakan tanggung jawabnya untuk mengalihkan kepada para peserta tetapi juga mampu menggunakan teknik mengajar yang paling efektif;
- 5) Penentuan teknik dan metode belajar-mengajar yang tidak terpaku hanya pada ceramah akan tetapi juga teknik dan metode lain seperti simulasi, “*role playing*”, studi kasus, pelatihan laboratorium, bimbingan dalam belajar mandiri, dan “*management games*”;
- 6) Penyelenggaraan yang sebaik mungkin dalam arti disiplin dalam kehadiran, ketaatan pada jadwal, penyelenggaraan ujian, dan pemeriksaan hasilnya;
- 7) Penilaian dan umpan balik untuk mengetahui apakah program pendidikan dan pelatihan mencapai sasarnya atau tidak dan apakah efektif atau tidak.

Menurut (Sun’an, 2015), “secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*”. Maka dari itu berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas

Sumber Daya Manusia (SDM), merujuk pada Tjokrowinto (1996), “indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya (Sun’an, 2015).

Keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan sangat erat kaitannya dengan tujuan mempercepat pencapaian pembangunan inklusif. Pertumbuhan inklusif digunakan sebagai jalan tengah sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang menysar perbaikan ekonomi dan non-ekonomi. Maka esensi tujuan pembangunan inklusif esensinya adalah memberikan kesejahteraan bagi manusia (*people center*). Jika digambarkan skema keterkaitan antara pengembangan SDM dengan aspek pertumbuhan inklusif dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Keterkaitan Aspek Pertumbuhan Inklusif (Firdausy, 2020)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yang menjadi batasan penelitian merupakan hasil dari beberapa kajian literatur yang sesuai dengan kondisi eksisting Desa Plunturan. Adapun fokus penelitian ini mengacu pada (Firdausy, 2020) adalah Pengembangan Kapasitas SDM melalui Pertumbuhan Inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan:

- a) Sumberdaya untuk pembangunan;
- b) Ketenagakerjaan yang layak;
- c) Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, dan
- d) Meningkatnya standar penghidupan

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan langkah analisis data kualitatif Cresswell. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan analisis data adalah menyiapkan data mentah berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi dan data pendukung lainnya. Data yang sangat beragam membutuhkan klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan. Tahapan tersebut menurut Cresswell (Sugiyono, 2012) adalah sebagai berikut:

- a) *Organizing and prepare data for analysis*
- b) *Reading through all data*
- c) *Start coding all of the data*
- d) *Used coding process to generate a description*
- e) *Interrelating theme*
- f) *Interpreting the meaning of theme*

(Sugiyono, 2012) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan mengacu pada fokus penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Sumberdaya untuk pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan tata kelola)

Potensi kearifan lokal Desa Plunturan adalah produk budaya yang terdiri dari Kesenian Reyog Ki Onggo Pati (Reyog Anak, Reyog Perempuan, Reyog Sepuh dan Reyog Taruna);

Gajah-Gajahan, Jathilan, Ganongan, Tledakan, Karawitan, Wayang Kulit, Coke'an, Metik Desa, Metri Tandur, Campursari, Sego Angkruk. Diketahui bahwa pelaku kesenian di Desa Plunturan terdiri dari lintas generasi. Regenerasi pelaku seni dilakukan melalui latihan rutin di sanggar-sanggar atau kelompok seni. Pada saat ini, pelaku seni mengaku bahwa potensi kesenian bukan merupakan mata pencaharian utama melainkan hobby dan kesenangan yang diturunkan dari tetua adat dan diteruskan antar generasi. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Plunturan sebagian besar adalah petani, pedagang, pegawai negeri, aparat pemerintahan, guru, petugas kesehatan dan karyawan swasta.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Plunturan menyebabkan kurangnya inisiatif dari pelaku seni untuk mempromosikan kegiatan kesenian ke luar desa. Sementara ini banyak dari pelaku seni yang masih mengandalkan undangan untuk mengisi acara tertentu, seperti perkawinan, bersih desa, khitanan, syukuran, penyambutan tamu dan pentas sebagai delegasi budaya. Berikut ini merupakan data kelompok seni dan jumlah seniman di Desa Plunturan.

Tabel 1.
Jumlah Pelaku Seni Yang Tergabung Dalam Kelompok Seni di Desa

| Kelompok Seni | Jumlah Seniman |
|---------------|----------------|
| Reyog | 3 kelompok |
| Gajah-Gajahan | 1 kelompok |
| Jathilan | 1 kelompok |
| Ganongan | 1 kelompok |
| Tledakan | 1 kelompok |
| Karawitan | 4 kelompok |
| Wayang Kulit | 1 kelompok |
| Coke'an | 1 kelompok |
| Metik Desa | 1 desa |
| Metri Tandur | 4 dusun |
| Campursari | 4 kelompok |

Sumber: Desa Plunturan, 2020

Menurut hasil wawancara dengan perangkat desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam artian ini adalah masyarakat masih belum memanfaatkan potensi kesenian yang dapat dikembangkan sebagai industri kreatif. Pemahaman konsep pengembangan wisata dan pengelolaannya masih kurang dan belum menjadi komitmen tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat luas. Namun secara konsistensi, pelaku kesenian melakukan latihan setiap minggu untuk meningkatkan kemampuan seni. Hal ini secara tidak langsung terdapat proses pendidikan dari tetua adat secara turun temurun ke generasi muda. Pelaku

kesenian mengatakan bahwa tidak selalu mendapatkan alokasi pendanaan, oleh karena itu berkegiatan berdasarkan semangat untuk mempertahankan budaya leluhur.

Pembangunan sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui beberapa program pemerintahan desa yang mana menjadi wadah bersama masyarakat membangun diri dan lingkungan. Pemerintah Desa telah menginisiasi lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak sekaligus sebagai fasilitator tata kelola kesenian Plunturan. Sejak tahun 2018, BUMDes melakukan kegiatan pengelolaan sumber mata air desa dan belum melaksanakan program percepatan pengelolaan kegiatan kesenian. Padahal, Kepala Desa Plunturan telah menginstruksikan secara tidak tertulis terkait dengan menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia, penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Sedangkan Pokdarwis yang berdiri di bawah pengelolaan BUMDes, telah melaksanakan beberapa festival dan gebyar budaya. Namun lembaga Pokdarwis juga masih belum memiliki legalitas yang jelas dari Kepala Desa (bersifat informal). Pembiayaan yang dikeluarkan selama ada pertunjukan seni berasal dari swadaya masyarakat dan kas desa. Namun pertunjukan yang telah dilakukan, belum mampu menghasilkan pemasukan bagi BUMDes dan Desa Plunturan. Oleh karena itu, pemerintah desa beserta masyarakat membutuhkan perhitungan cashflow yang seimbang agar tidak memberatkan masyarakat dan kas desa aman dengan pengembangan industri kreatif melalui desa wisata. Sehingga belum ada pendapatan khusus dari Desa Wisata Budaya Plunturan. Menilik perencanaan program dan kegiatan Desa Plunturan yang sudah tercantum pada dokumen rencana jangka menengah adalah sebagai berikut:

- a) Pemetaan potensi Wisata Desa Plunturan
- b) Gebyar budaya
- c) Deklarasi awal Desa Plunturan menjadi desa wisata budaya
- d) Kolaborasi pengembangan desa wisata budaya dengan akademisi dan swasta
- e) Penetapan *blue print* Desa Plunturan menjadi desa wisata budaya
- f) Perbaikan infrastruktur desa
- g) Legalisasi kelompok seni
- h) Pembangunan area pementasan
- i) Pengembangan pusat kajian dan pusat informasi
- j) Pembangunan pasar wisata

- k) Penguatan kualitas SDM dengan fokus kesiapan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata budaya
- l) Pengadaan sarana dan prasarana pertunjukan Reyog digital
- m) Penandatanganan MoU dengan mitra-mitra baru
- n) Penguatan SDM dengan fokus peningkatan keterampilan digitalisasi wisata budaya
- o) Penguatan SDM dengan fokus pendampingan pengelolaan wisatawan

Dari lima belas (15) kegiatan di atas, yang sudah dan sedang dilakukan menurut Pemerintahan Desa Plunturan adalah a) Pemetaan potensi Wisata Desa Plunturan melalui kegiatan KKN mahasiswa berkolaborasi dengan pemerintahan desa; b) Gebyar budaya (setiap tahun pada bulan purnama, Bulan Januari); c) Deklarasi awal Desa Plunturan menjadi desa wisata budaya (sudah dilakukan pada Bulan Januari 2019); d) Kolaborasi pengembangan desa wisata budaya dengan akademisi dan swasta (sedang dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur); e) Penetapan *blue print* Desa Plunturan menjadi desa wisata budaya (sudah dilakukan pada tahun 2019); dan f) Perbaikan infrastruktur desa (sedang dilakukan terutama akses masuk menuju pusat kesenian dan Balai Desa Plunturan).

2. Ketenagakerjaan yang layak

Seperti yang sudah dijelaskan pada aspek sumberdaya untuk pembangunan manusia, pekerjaan utama masyarakat desa bukan di bidang kesenian. Kesenian Plunturan dikelola secara mandiri oleh masing-masing kelompok seni, dimana kelompok-kelompok seni tersebut diwadahi oleh kepala desa dengan menyelenggarakan festival seni secara rutin setiap tanggal 25. Menurut Kepala Desa Plunturan, pemberian kesempatan mengadakan festival bertujuan untuk memelihara eksistensi dari pelaku seni dan menjadi hiburan masyarakat. Kelemahan yang masih terlihat menonjol terkait aspek ketenagakerjaan adalah pengelolaan pendapatan pelaku seni belum ideal. Hal ini dikarenakan tidak ada pemasukan ke dalam kas desa ketika ada pertunjukan seni dilaksanakan. Pokdarwis juga belum menjadi agen perubahan dan pengembangan wisata untuk mendatangkan sumber pendapatan dari masyarakat luar.

Pemerintah desa berkeinginan jika ada pertunjukan, akan diberlakukan pengelolaan tempat wisata sebagaimana mestinya. Tercetusnya konsep pengembangan desa wisata masih belum memiliki grand design yang membuat pelaku usaha, masyarakat dan pihak swasta serta akademisi belum bisa melangkah lebih jauh. Beberapa rencana kegiatan yang sudah disusun oleh pemerintah desa harusnya segera disahkan menjadi SK atau Peraturan Desa dimana dapat sebagai acuan untuk penggerak pertumbuhan ekonomi. Adanya potensi kesenian dapat pula berdampak pada sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan, misalnya dibentuknya pemandu wisata, UKM sentra oleh-oleh khas, dan sebagainya.

3. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,

Aspek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Plunturan dapat dikembangkan melalui industri kreatif dari wisata budaya. Pengelolaan pembangunan desa dan pengetahuan masyarakat sangat berkaitan erat dalam mengembangkan potensi budaya. Dengan adanya kegiatan festival budaya dan gebyar budaya, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan desa wisata dapat bergulir ke sektor lainnya.

Selama ini, lokasi tempat pertunjukan seni berada di satu lokasi dengan halaman Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Plunturan. Dengan tempat penyimpanan peralatan seni (dadak merak, gamelan, kostum, sound system dan peralatan penunjang lainnya) sekaligus tempat latihan di balai desa yang bersebelahan dengan SDN 1 dan 2 Plunturan. Berdasarkan deklarasi Pemerintah Desa Plunturan untuk mengusung Desa Wisata Budaya, pemerintah mulai mempersiapkan fasilitas wisatawan yang berkunjung ke Desa Plunturan. Pembangunan fasilitas akomodasi mulai dibangun dengan bekerjasama dengan swasta dan akademisi yang selesai pada Tahun 2020. Ada 6 kamar *homestay* dan 20 rumah penduduk yang representatif digunakan sebagai hunian wisatawan domestik dan asing. Sarana dan prasarana Desa Plunturan yang dapat mendukung pengembangan wisata budaya juga mulai dikelola pemerintah desa beserta masyarakat. Seluruh desa sudah dialiri aliran listrik, air bersih yang diambil dari tanah dan masing-masing rumah memiliki tempat penampungan air untuk kebutuhan sehari-hari. Fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan wisatawan diantaranya adalah toilet umum, tempat parkir, puskesmas desa, jaringan komunikasi yang dapat diakses di daerah balai desa, lapangan pertunjukan (di beberapa titik jangkauannya terbatas). Akses menuju Desa Plunturan juga sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar desa dan antar daerah. Sarana transportasi menuju desa masih mengandalkan kendaraan pribadi, belum ada transportasi umum yang bisa digunakan. Kondisi jalan menuju pusat Budaya Plunturan tidak sepenuhnya bagus. Sampai dengan saat ini belum ada tempat khusus untuk menggelar seni budaya yang cukup, seperti panggung pertunjukan yang permanen dengan tata panggung, tata lampu, tata surya dan tempat penonton yang nyaman.

Beberapa kuliner yang diproduksi adalah Nasi Angkruk, Pecel Pincuk, Sambel Pecel, Krupuk Telo, Telor Asin, Kripik Enthik, Stik Ubi Kuning, Minuman Kunir Asam, Minuman Beras Kencur. Sedangkan produk souvenir yang diproduksi oleh masyarakat adalah gantungan kunci, baju Reyog, tas, gentong curug dan stiker. Ada 9 UMKM yang sudah berjalan di desa dan selama ini berjalan selama mandiri. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sumber pendapatan desa terdiri dari 1) pendapatan asli desa, terdiri dari a) hasil usaha

desa, b) hasil kekayaan desa, c) hasil swadaya dan partisipasi, d) hasil gotong-royong, e) lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2) bantuan dari pemerintah kabupaten, terdiri dari a) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, b) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten; 3) bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; 4) sumbangan dari pihak ketiga; 5) pinjaman desa. Maka dari itu, upaya pemerintah desa berupaya melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa di sekitar Desa Plunturan, salah satunya adalah Desa Pulung. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah dilakukan melalui agenda rutin festival budaya dan ditunjuk sebagai salah satu desa dengan budaya original oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Program “Indonesiana”. Sedangkan kerjasama swasta dan LSM sudah terjalin dengan perusahaan lokal di Kabupaten Ponorogo, diantaranya “ASPRO”, Metro TV, Berita Jatim, Media Online Pacitan.com, RRI Madiun dan sedang merintis kerjasama internasional dengan “*SINJU PRODUCE JAPAN* dan *JAPAN ENTERPRISE INSTITUTE*” melalui Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Berdasarkan kekurangan dan potensi wisata budaya Desa Plunturan, dapat dilakukan penyusunan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keinginan kepala beserta perangkat desa yaitu pemetaan potensi ekonomi desa untuk menjadikan aktor penggerak UMKM pendukung kegiatan festival budaya. Setelah adanya pemetaan ekonomi desa, akan dilakukan pelatihan pengelolaan industri wisata bagi masyarakat dan peningkatan kualitas branding UMKM berbasis kearifan lokal. Setelah UMKM siap untuk bersaing, akan dilakukan pendampingan sertifikasi dan standarisasi produk makanan/minuman/souvenir. Dalam peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan kegiatan kebudayaan, perangkat desa melalui peningkatan kompetensi masyarakat di bidang *public communication*, peningkatan *self awareness*, *self of belonging* dan kesiapan kunjungan wisatawan ke desa. Panduan singkat untuk merumuskan produk wisata sejarah dan warisan budaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa adalah:

- a) Merumuskan produk wisata yang terangkai dalam jejak warisan budaya (*heritage trail*) sebagai rangkaian tujuan wisata di Desa Plunturan;
- b) Merincikan produk wisata berupa jejak warisan budaya (*heritage trail*) menjadi jadwal perjalanan (*itinerary*) yang akan menjadikan bagian dari paket wisata yang ditawarkan pada wisatawan pada jadwal-jadwal pementasan tertentu;
- c) Melakukan inovasi produk destinasi secara khusus yang disesuaikan dengan segmentasi pasar, serta permintaan dan kebutuhan wisatawan dengan motivasi khusus, misalnya mengisi acara sambutan pemerintah kabupaten.

4. Meningkatnya standar penghidupan

Dalam meningkatkan standar penghidupan masyarakat Desa Plunturan, pemerintah desa telah melakukan pemetaan kasar terkait potensi ekonomi desa. Beberapa kuliner yang diproduksi adalah Nasi Angkruk, Pecel Pincuk, Sambel Pecel, Krupuk Telo, Telor Asin, Kripik Enthik, Stik Ubi Kuning, Minuman Kunir Asam, Minuman Beras Kencur. Sedangkan produk souvenir yang diproduksi oleh masyarakat adalah gantungan kunci, baju Reyog, tas, gentong curug dan stiker. Ada 9 UMKM yang sudah berjalan di desa dan selama ini berjalan selama mandiri. Berbagai masalah yang dihadapi UMKM dan calon UMKM, kebanyakan adalah permasalahan modal dan pemasaran produk. Menurut Nugroho (2015) dalam (Firdausy, 2020), "Terbatasnya kredit perbankan kepada sektor UMKM merupakan alasan penting bagi pemerintah untuk menggulirkan berbagai program kredit mikro kepada sektor UMKM.

Kepala desa meyakini bahwa keberadaan BUMDes yang ideal harusnya mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. BUMDes memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya harus terbuka untuk masyarakat desa. Hal ini dapat mempermudah pengelolaan kegiatan UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya terkait pemenuhan mendukung kegiatan wisata budaya. Jika pengelolaan kegiatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik, maka standar penghidupan di Desa Plunturan juga akan meningkat. Sementara ini, untuk kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan wisata budaya belum terkoordinasi dengan baik oleh BUMDes. Namun sebagian besar masyarakat Desa Plunturan memiliki penghidupan yang baik dan layak sebagaimana layaknya masyarakat desa lainnya. Pada umumnya pendapatan masyarakat beragam tergantung pekerjaan utama dan kebutuhan masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 dan Pasal 89 dikeluarkan, pemerintah menjadikan Upah Minimum sebagai standar kebutuhan hidup layak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003). Menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 185/538/KPTS/013/2020 tentang UMK, UMK Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 1.938.321,73. Menurut perangkat desa, rata-rata masyarakat Desa Plunturan pendapatan setiap bulannya sudah mencapai UMK mengingat sebagian masyarakat memiliki pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan seperti petani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pengembangan kapasitas SDM melalui pertumbuhan

inklusif dalam mendukung Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan sudah berjalan tetapi masih sangat lambat. Sumber daya untuk pembangunan Desa Wisata Plunturan masih belum siap dalam segala aspek dimulai dari kapasitas SDM, pendidikan bahas asing dan pemahaman sapta pesona pariwisata di Indonesia. Jika sumber daya ini kuat, maka pertumbuhan ekonomi yang berlangsung juga kuat dan berkelanjutan sehingga terciptanya redistribusi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari aspek ketenagakerjaan, belum terkoordinasi dengan baik oleh Pemerintah Desa, BUMDes dan Pokdarwis serta lembaga pemerintah desa lainnya dalam ruang lingkup pengembangan Desa Wisata Plunturan sehingga pertumbuhan ekonomi di desa sangat lambat. Hal ini berakibat lemahnya daya saing antar desa dan/atau daerah. Aspek-aspek tersebut jika berjalan dan terkoordinasi dengan baik, maka outputnya adalah dapat meningkatkan standar penghidupan Desa Plunturan.

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk Pemerintah Desa Plunturan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan inklusif dalam mendukung desa wisata budaya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana strategi pengembangan desa wisata bagi pengelola wisata (Pemerintah Desa, BUMDes dan Pokdarwis)
- b) Melakukan pendampingan kepada remaja untuk meningkatkan kontribusi dalam pelestarian budaya Desa Plunturan khususnya dalam komunikasi bahasa asing, *self awareness*, dan *self of belonging*;
- c) Glokalisasi cerita rakyat dan mitos serta Reyog Ki Onggo Pati yang dibukukan dan di HKI kan sebagai produk budaya asli Desa Plunturan
- d) Melakukan pendampingan pengelolaan industri wisata serta meningkatkan kualitas branding UMKM berbasis kearifan lokal dan standarisasi produk makanan/minuman/souvenir bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, C. M. E. L. (2020). *Fundamen Konsep Pembangunan Inklusif Berdaya Saing: Vol. I* (I). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, A., & Wijayanto, P. (2019). *Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya: Vol. I* (I). Kementerian Pariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 Tahun 2003, 1 (2003).
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Vol. I* (I). Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 11 Tahun 2009, 1 (2009).

Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sun'an, M. A. S. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.

Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (I)*. Gava Media.